



Ascendia: Journal of Economic and Business Advancement

Vol 1 No 1 September 2025, Hal 41-51
ISSN: XXXX-XXXX (Print) ISSN: XXXX-XXXX (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/ascendia/index>

Ekonomi Islam sebagai Paradigma Etis dalam Transformasi Bisnis Modern Berkelanjutan: Kajian Perbandingan dengan Ekonomi Konvensional

M. Ferdiyan^{1*}, Anisah Harahap²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

email: m.ferdiyan46@gmail.com¹, nabilacial@gmail.com²

Article Info :

Received:

20-8-2025

Revised:

30-8-2025

Accepted:

23-9-2025

Abstract

This study analyzes the comparison between Islamic economic principles and conventional economics in shaping a modern business paradigm that is ethical and sustainable. Through a qualitative approach based on literature review, this study identifies differences in value orientation, financial structure, and social implications of the two economic systems. The results show that Islamic economics, with its principles of maqashid sharia, distributive justice, and prohibition of usury, is capable of creating a more inclusive business model oriented towards social welfare. Data from the OJK, Bank Indonesia, and the Islamic Development Bank show an average growth of 9% per year in sharia assets and an increase in the MSME financing ratio to 71%. Meanwhile, the conventional economy is still dominated by short-term profit logic that often disregards ethical values and social balance. This study emphasizes that the integration of Islamic values into modern economic policy can be a strategic solution to realize a sustainable business system that is in line with the principles of justice and universal welfare.

Keywords : Islamic economics, sustainable business, economic ethics, maqashid syariah, distributive justice.

Akbsrak

Penelitian ini menganalisis perbandingan prinsip ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam membentuk paradigma bisnis modern yang etis dan berkelanjutan. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, kajian ini mengidentifikasi perbedaan orientasi nilai, struktur keuangan, dan implikasi sosial dari kedua sistem ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam, dengan prinsip *maqashid syariah*, *keadilan distributif*, dan larangan riba, mampu menciptakan model bisnis yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Data dari OJK, Bank Indonesia, dan Islamic Development Bank menunjukkan pertumbuhan aset syariah rata-rata 9% per tahun serta peningkatan rasio pembiayaan UMKM hingga 71%. Sementara itu, ekonomi konvensional masih didominasi logika profit jangka pendek yang sering mengabaikan nilai etika dan keseimbangan sosial. Kajian ini menegaskan bahwa integrasi nilai Islam dalam kebijakan ekonomi modern dapat menjadi solusi strategis untuk mewujudkan sistem bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan universal.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, bisnis berkelanjutan, etika ekonomi, maqashid syariah, keadilan distributif.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perubahan dinamika ekonomi global pada abad ke-21 telah mendorong transformasi besar dalam cara bisnis dijalankan dan dimaknai (Damanik, 2025). Dunia usaha kini tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, serta tata kelola yang beretika (Sugianto, 2025). Krisis ekologis dan ketimpangan ekonomi yang kian meningkat menunjukkan kelemahan sistem ekonomi yang berorientasi pada kapitalisasi tanpa batas. Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan paradigma ekonomi baru yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Ekonomi konvensional yang mendominasi praktik bisnis modern sering kali mengabaikan dimensi moral dalam pengambilan keputusan ekonomi (Agustin, 2025). Orientasi utamanya yang menekankan pada efisiensi dan akumulasi modal kerap menimbulkan ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya alam. Keberlanjutan sering kali dimaknai sebatas strategi reputasional, bukan

sebagai bagian integral dari nilai perusahaan. Akibatnya, bisnis kehilangan makna sosialnya sebagai instrumen kesejahteraan publik dan cenderung terjebak dalam logika profit semata (Fani, 2025).

Sebaliknya, ekonomi Islam hadir dengan menawarkan pendekatan yang lebih holistik terhadap kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kemaslahatan (*maslahah*) menjadi landasan moral yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan (Wulan, 2025). Etika dalam ekonomi Islam tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan inti dari seluruh aktivitas ekonomi (Nurishak, 2025). Paradigma ini memberikan arah baru bagi pengelolaan bisnis modern yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keberlanjutan jangka panjang.

Transformasi menuju bisnis berkelanjutan menuntut integrasi antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab moral. Di sinilah ekonomi Islam menawarkan kontribusi penting melalui prinsip *maqashid syariah*, yang menekankan pemeliharaan nilai-nilai dasar kehidupan manusia seperti harta, akal, keturunan, dan lingkungan. Pendekatan ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung menilai keberhasilan bisnis dari pertumbuhan dan laba jangka pendek. Nilai-nilai Islam memberikan kerangka etik yang menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat serta alam.

Banyak perusahaan mulai mengadopsi konsep *sustainable business* untuk merespons tekanan pasar dan regulasi internasional (Purwandani & Michaud, 2021). Namun, sebagian besar implementasi tersebut masih bersifat kosmetik dan belum menyentuh substansi moral dari keberlanjutan itu sendiri. Konsep *corporate social responsibility* sering kali dijalankan sebatas kewajiban hukum atau alat promosi, bukan refleksi kesadaran etis (Kandpal, 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori bisnis berkelanjutan dengan realitas moral yang diharapkan masyarakat.

Pendekatan ekonomi Islam berpotensi menjembatani kesenjangan tersebut melalui sistem nilai yang komprehensif dan terukur. Prinsip keadilan distributif, larangan riba, serta tanggung jawab sosial dalam bentuk zakat dan wakaf dapat memperkuat struktur ekonomi yang lebih inklusif (Karimullah, 2025). Nilai *amanah* dan *ihsan* memberikan dorongan moral bagi pelaku bisnis untuk bertindak jujur dan transparan dalam seluruh proses ekonomi (Soleh & Sarmadi, 2024). Dengan mengintegrasikan aspek spiritual ke dalam manajemen modern, ekonomi Islam mampu memberikan arah etis bagi praktik bisnis yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Perbandingan antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menjadi relevan dalam menilai sejauh mana etika dan nilai-nilai kemanusiaan dapat diinternalisasi ke dalam sistem bisnis modern (Hakim & Nuryadin, 2024). Ekonomi konvensional unggul dalam inovasi dan efisiensi pasar, tetapi kerap kehilangan pijakan moral dalam mengejar pertumbuhan. Sementara itu, ekonomi Islam menawarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif. Kajian perbandingan ini penting untuk menemukan titik temu antara rasionalitas ekonomi dan nilai-nilai spiritual yang dapat memperkuat pondasi pembangunan berkelanjutan.

Keberlanjutan bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya diukur melalui keuntungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip *tawhid* dan *khalifah* mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan bumi sebagai bagian dari amanah Tuhan (Widiastuty & Anwar, 2025), sehingga kegiatan bisnis bukan hanya sarana memperoleh pendapatan, tetapi juga bentuk ibadah sosial yang berorientasi pada kebermanfaatan luas. Perspektif ini memberikan dimensi baru bagi konsep keberlanjutan yang selama ini didominasi oleh pendekatan materialistik.

Penelitian ini berupaya menelaah secara komparatif perbedaan dan titik konvergensi antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam konteks pengelolaan bisnis modern berkelanjutan. Melalui analisis literatur, penelitian ini berusaha mengungkap sejauh mana nilai-nilai etika Islam dapat melengkapi prinsip ekonomi konvensional agar tercipta sistem bisnis yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan paradigma bisnis berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mendorong integrasi antara nilai moral dan rasionalitas ekonomi dalam praktik bisnis global yang kian kompetitif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam konteks pengelolaan bisnis modern berkelanjutan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional

terindeks Scopus dan SINTA, buku akademik, laporan lembaga ekonomi Islam, serta publikasi resmi pemerintah yang relevan dengan tema keberlanjutan bisnis. Seluruh data dikumpulkan melalui proses seleksi sistematis dengan menitikberatkan pada keakuratan, relevansi, dan kebaruan informasi. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap teori dan temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai paradigma etis dalam ekonomi Islam dan implementasinya terhadap praktik bisnis kontemporer.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang menekankan interpretasi konseptual dan kontekstual terhadap sumber literatur. Peneliti mengidentifikasi pola-pola pemikiran, prinsip dasar, serta perbedaan orientasi antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Hasil analisis kemudian disintesis dalam bentuk model naratif yang menggambarkan relevansi nilai-nilai etika Islam terhadap praktik bisnis modern yang berkelanjutan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara dimensi moral, spiritual, dan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan paradigma ekonomi beretika di era digital dan globalisasi bisnis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Ekonomi Konvensional dan Dampaknya terhadap Model Bisnis Modern

Ekonomi konvensional berakar pada paradigma rasionalitas individu yang memandang manusia sebagai *homo economicus* yang bertindak untuk memaksimalkan kepuasan dan keuntungan pribadi (Suryadi, 2025). Prinsip utama sistem ini adalah efisiensi pasar, kebebasan persaingan, dan optimalisasi utilitas yang diukur melalui akumulasi kapital. Keberhasilan ekonomi diukur melalui pertumbuhan output dan peningkatan produktivitas tanpa mempertimbangkan aspek etika atau distribusi kesejahteraan (Sahara, 2024). Paradigma tersebut mendorong terjadinya spesialisasi ekonomi yang efisien, namun sering kali mengabaikan keseimbangan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Ketika diterapkan secara luas dalam bisnis modern, logika kapitalistik ini menimbulkan tekanan untuk terus meningkatkan nilai tambah tanpa memperhatikan implikasi moral dan ekologis.

Orientasi keuntungan jangka pendek menjadi karakter dominan dalam praktik bisnis konvensional yang beroperasi dalam sistem pasar bebas. Perusahaan cenderung menilai kinerja berdasarkan rasio keuangan seperti *return on investment* (ROI) atau *earnings per share* (EPS), yang tidak sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan sosial (Suratman, 2024). Akibatnya, aspek sosial dan lingkungan sering kali dikorbankan demi kepentingan pemegang saham. Fenomena *profit maximization* menyebabkan munculnya ketimpangan ekonomi antara pelaku usaha besar dan masyarakat pekerja. Ketidakeimbangan ini menjadi kritik mendasar terhadap model ekonomi konvensional yang dianggap tidak mampu menjawab tantangan keadilan distributif di era modern.

Globalisasi ekonomi memperkuat penetrasi nilai-nilai pasar bebas yang menempatkan modal sebagai pusat kekuasaan ekonomi. Kebijakan liberalisasi perdagangan dan deregulasi investasi menciptakan kompetisi terbuka yang menguntungkan korporasi besar dengan akses modal tinggi (Meng, 2024). Di sisi lain, pelaku usaha kecil sering kali terpinggirkan akibat lemahnya daya saing struktural dan keterbatasan sumber daya. Data Bank Dunia (2024) menunjukkan bahwa 10% perusahaan besar di Asia Tenggara menguasai lebih dari 70% aset produktif di sektor industri dan perdagangan. Konsentrasi kekayaan ini menimbulkan paradoks, di mana pertumbuhan ekonomi meningkat, namun distribusi hasilnya semakin timpang antar kelas sosial.

Kelemahan sistem ekonomi konvensional juga tampak pada ketergantungan tinggi terhadap ekspansi konsumsi dan utang korporasi. Prinsip *aggregate demand* yang mendorong konsumsi berlebihan telah menyebabkan munculnya siklus ekonomi yang rentan terhadap krisis (Zuhdi, 2024). Pengalaman krisis keuangan global 2008 dan resesi pandemi 2020 menunjukkan bahwa ekonomi berbasis spekulasi tidak mampu mempertahankan stabilitas jangka panjang. *International Monetary Fund* (IMF, 2023) melaporkan bahwa total utang korporasi global mencapai 98% dari PDB dunia, dengan pertumbuhan tertinggi di negara berkembang seperti Indonesia yang naik 9,2% per tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan berbasis leverage tidak selalu identik dengan keberlanjutan ekonomi.

Meskipun memiliki kelemahan mendasar, ekonomi konvensional juga berperan penting dalam membangun fondasi efisiensi dan inovasi dalam bisnis modern. Mekanisme pasar bebas memungkinkan terciptanya persaingan sehat yang mendorong inovasi teknologi, efisiensi biaya, dan peningkatan

kualitas produk. Namun, dalam praktiknya, inovasi sering kali diarahkan untuk meningkatkan margin keuntungan, bukan untuk memperkuat nilai sosial atau lingkungan. Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2023) menunjukkan bahwa 67% investasi riset korporasi global masih berfokus pada peningkatan efisiensi produksi, sementara hanya 18% diarahkan pada inovasi berkelanjutan. Ketimpangan fokus ini menunjukkan bahwa dorongan etika dalam ekonomi konvensional masih bersifat marginal.

Dampak lain dari penerapan prinsip ekonomi konvensional adalah terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara intensif. Pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi telah meningkatkan risiko degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem global. Data *United Nations Environment Programme* (UNEP, 2024) mencatat bahwa aktivitas industri menyumbang 35% dari total emisi karbon global, dengan sektor energi dan transportasi sebagai penyumbang utama. Pola ini memperlihatkan bahwa model pertumbuhan konvensional masih berorientasi pada kuantitas, bukan kualitas pembangunan. Akibatnya, isu keberlanjutan menjadi tekanan eksternal yang harus dihadapi perusahaan melalui reformulasi strategi bisnis yang lebih etis.

Kritik terhadap model ekonomi konvensional mendorong munculnya konsep *corporate social responsibility* (CSR) dan *environmental, social, and governance* (ESG) sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku korporasi. Konsep ini berupaya menyeimbangkan antara profit, people, dan planet sebagai tiga pilar keberlanjutan bisnis. Namun, implementasinya sering kali bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar paradigma ekonomi yang berorientasi pada laba. Berdasarkan survei PwC Global ESG Report (2024), hanya 31% perusahaan di Asia yang benar-benar mengintegrasikan indikator sosial dan lingkungan dalam strategi bisnisnya. Fakta ini menunjukkan bahwa moralitas bisnis dalam sistem ekonomi konvensional masih bersifat instrumental dan belum menjadi bagian dari nilai inti perusahaan.

Untuk memperkuat analisis ini, berikut disajikan data empiris mengenai indikator ketimpangan dan keberlanjutan ekonomi di negara-negara dengan sistem pasar konvensional dominan:

Tabel 1. Indikator Ketimpangan dan Keberlanjutan Ekonomi di Negara Pasar Konvensional (2023–2024)

Negara	Rasio Gini (%)	Pertumbuhan PDB (%)	Emisi Karbon (Ton per Kapita)	Indeks Keberlanjutan Bisnis (Skala 100)
Amerika Serikat	41,1	2,4	14,7	66
Jepang	32,9	1,6	8,9	72
Korea Selatan	33,6	2,3	11,5	70
Indonesia	38,6	5,0	9,1	63
Singapura	39,8	3,4	10,7	77

Sumber: Diolah dari World Bank (2024), OECD (2024), IMF (2024), UNDP (2024), dan Badan Pusat Statistik (BPS, 2024).

Data pada tabel menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih tinggi di negara dengan sistem ekonomi pasar konvensional, bahkan di negara maju dengan infrastruktur keuangan kuat. Rasio Gini di atas 35% menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata, sementara emisi karbon per kapita yang tinggi mengindikasikan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia, sebagai negara berkembang yang menganut sistem ekonomi terbuka, menghadapi tantangan serupa meskipun pertumbuhan PDB relatif stabil. Indeks keberlanjutan bisnis nasional yang masih di bawah 65 menggambarkan bahwa dimensi etika dan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam strategi korporasi. Hal ini menguatkan argumentasi bahwa pendekatan ekonomi konvensional perlu direformulasi agar selaras dengan nilai keberlanjutan jangka panjang.

Model bisnis modern yang berkembang di bawah paradigma ekonomi konvensional cenderung mengedepankan efisiensi jangka pendek melalui mekanisme pasar kompetitif. Perusahaan dengan struktur keuangan kuat mampu mendominasi pasar dan menekan biaya produksi melalui teknologi otomatisasi dan globalisasi rantai pasok. Namun, strategi ini sering kali mengabaikan dimensi sosial seperti kesejahteraan pekerja dan stabilitas komunitas lokal. Berdasarkan laporan International Labour

Organization (ILO, 2024), sekitar 16% pekerja di sektor industri digital Asia menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat sistem kontrak fleksibel. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efisiensi ekonomi tidak selalu identik dengan keberlanjutan sosial.

Tekanan pasar global juga menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dalam menghadapi tuntutan efisiensi dan tanggung jawab sosial yang semakin kompleks. Namun, ketika orientasi utama tetap pada pertumbuhan ekonomi semata, maka dimensi etika sering terpinggirkan dari agenda korporasi. Etika dianggap sebagai variabel eksternal yang tidak berkontribusi langsung terhadap nilai perusahaan. Paradigma ini menyebabkan perusahaan hanya merespons isu moral ketika ada tekanan publik atau regulasi pemerintah (Fauza, 2025). Akibatnya, bisnis modern masih beroperasi dalam ruang abu-abu antara tanggung jawab sosial dan kepentingan ekonomi.

Perspektif ekonomi konvensional pada akhirnya membentuk tatanan bisnis global yang rasional, efisien, namun kurang manusiawi. Prinsip utilitarianisme yang menjadi dasar sistem ini menempatkan kesejahteraan kolektif sebagai hasil sampingan dari kepentingan individu, bukan tujuan utama. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan antara logika pasar dan nilai moral dapat melemahkan fondasi kepercayaan publik terhadap sektor bisnis. Situasi ini menjadi alasan kuat bagi munculnya paradigma baru yang menempatkan etika sebagai komponen integral dari pembangunan ekonomi. Ekonomi Islam menawarkan alternatif konseptual yang tidak hanya menyeimbangkan aspek material dan spiritual, tetapi juga memberikan arah moral bagi transformasi bisnis berkelanjutan.

Etika dan Nilai Fundamental Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Bisnis Berkelanjutan

Paradigma ekonomi Islam berakar pada prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-mizan*), dan kemaslahatan (*al-maslahah*), yang membentuk fondasi etika ekonomi dalam seluruh aktivitas bisnis (Afdhal, 2024). Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif, melainkan menjadi kerangka kerja strategis dalam mengarahkan perilaku ekonomi agar berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Menurut *Islamic Development Bank* (2024), penerapan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam berfungsi untuk menghapuskan praktik eksploitatif seperti riba, gharar, dan maysir yang menjadi penyebab utama ketimpangan ekonomi global. Pendekatan ini memandang aktivitas ekonomi sebagai ibadah sosial yang menuntut keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan tanggung jawab moral terhadap Masyarakat. Sistem bisnis Islam dikembangkan berdasarkan integrasi nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan yang utuh.

Nilai etis dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya *amanah* dan *ihsan* sebagai prinsip moral yang mendasari hubungan antara pelaku usaha, konsumen, dan masyarakat. Dalam praktik bisnis modern, kedua nilai tersebut diterjemahkan melalui transparansi keuangan, akuntabilitas sosial, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan pekerja. Laporan Bank Indonesia (2024) menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip *amanah* dan *ihsan* mengalami peningkatan tingkat kepercayaan publik hingga 87%, jauh di atas rata-rata lembaga keuangan konvensional sebesar 74%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai etika Islam memiliki korelasi positif dengan reputasi bisnis dan keberlanjutan jangka panjang. Peningkatan kepercayaan publik juga mencerminkan bahwa dimensi moral memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam ekosistem bisnis kontemporer.

Konsep *maqashid syariah* menjadi inti dari paradigma ekonomi Islam dalam menilai keberlanjutan bisnis. Tujuan utama *maqashid syariah* meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan kehidupan manusia. Dalam konteks bisnis, penerapan prinsip ini menuntut agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan pekerja, kualitas produk halal, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2024) menunjukkan bahwa 62% perusahaan berbasis syariah di Indonesia telah mengintegrasikan prinsip *maqashid syariah* dalam strategi keberlanjutan mereka. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kemampuan adaptif terhadap dinamika bisnis modern tanpa kehilangan orientasi moralnya.

Etika ekonomi Islam juga memandang kepemilikan harta sebagai amanah yang harus dikelola dengan prinsip keadilan distributif. Pemanfaatan kekayaan yang berlebihan untuk kepentingan pribadi dianggap sebagai bentuk pelanggaran sosial yang mengancam keseimbangan ekonomi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mencatat bahwa lembaga keuangan syariah di Indonesia menyalurkan pembiayaan mikro sebesar Rp 286 triliun pada 2023, di mana 71% di antaranya dialokasikan kepada sektor usaha kecil dan menengah berbasis komunitas. Penyaluran ini

mencerminkan implementasi nyata prinsip keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam. Orientasi keadilan distributif ini menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dan konvensional yang lebih menitikberatkan pada efisiensi dan akumulasi kapital.

Sistem ekonomi Islam memiliki keunggulan moral karena mengintegrasikan aspek spiritual ke dalam kebijakan ekonomi dan bisnis. Pendekatan ini menolak eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan mendorong praktik bisnis ramah lingkungan melalui konsep *khilafah fil ardh* (pengelolaan bumi yang bertanggung jawab). Islamic Development Bank (2024) mencatat bahwa negara-negara anggota OIC yang menerapkan kebijakan keuangan syariah mengalami peningkatan indeks keberlanjutan lingkungan sebesar 1,8 poin dalam periode 2020–2023. Data tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan etis Islam mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* global. Etika Islam pada akhirnya berfungsi sebagai instrumen kebijakan moral dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan:

Tabel 2. Indikator Kinerja Keuangan dan Keberlanjutan Lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia, 2020–2024

Tahun	Total Aset Keuangan Syariah (Rp Triliun)	Pertumbuhan (% per Tahun)	Rasio Pembiayaan UMKM (%)	Indeks Keberlanjutan (0–100)
2020	631	—	58	68
2021	698	10.6	61	70
2022	760	8.9	65	73
2023	834	9.7	69	76
2024	905	8.5	71	79

Sumber: Bank Indonesia (2024); Otoritas Jasa Keuangan (2024); Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2024); Islamic Development Bank (2024)

Data pada tabel menunjukkan peningkatan konsisten pada aset keuangan syariah dan rasio pembiayaan untuk sektor UMKM selama periode 2020–2024, menandakan arah pertumbuhan yang inklusif dan berorientasi sosial. Peningkatan indeks keberlanjutan yang mencapai 79 poin pada tahun 2024 memperlihatkan kemampuan sistem keuangan syariah dalam menggabungkan profitabilitas dengan nilai keberlanjutan jangka panjang. Pertumbuhan rata-rata 9% per tahun juga mengindikasikan stabilitas struktural sektor syariah di tengah fluktuasi ekonomi global. Kecenderungan ini selaras dengan kebijakan ekonomi nasional yang menempatkan ekonomi syariah sebagai pilar penggerak pembangunan berkelanjutan. Tren tersebut memperlihatkan bahwa sistem keuangan berbasis etika mampu menjadi motor pertumbuhan yang adil dan resilien.

Kontribusi ekonomi Islam terhadap pemberdayaan sosial juga terlihat dari peningkatan partisipasi lembaga zakat dan wakaf produktif dalam kegiatan ekonomi riil. Berdasarkan data BAZNAS (2024), total penghimpunan zakat nasional mencapai Rp 28,4 triliun pada 2023, naik 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk program pemberdayaan ekonomi produktif seperti pelatihan wirausaha dan pembiayaan mikro. Model pengelolaan zakat produktif ini memperlihatkan dimensi ekonomi Islam yang menekankan pemerataan dan keadilan sosial sebagai instrumen keberlanjutan, sehingga sistem ekonomi Islam bukan hanya alternatif ideologis, tetapi juga mekanisme operasional yang mendukung ekonomi rakyat.

Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan sejati tercapai ketika hubungan antar manusia didasarkan pada kejujuran, keadilan, dan kasih sayang (Dayusman, 2023). Etika ini mendorong terbangunnya bisnis yang berorientasi pada kepercayaan (*trust-based economy*) yang menjadi pondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Laporan OJK (2024) menunjukkan bahwa perusahaan syariah dengan kebijakan tata kelola berbasis nilai etis memiliki tingkat kepatuhan hukum 15% lebih tinggi dibandingkan perusahaan konvensional. Kepatuhan tersebut meningkatkan daya saing global karena memperkuat reputasi dan menurunkan risiko litigasi bisnis. Fenomena ini membuktikan bahwa

prinsip moral dalam Islam bukan sekadar doktrin, tetapi juga instrumen strategis untuk membangun stabilitas ekonomi.

Penerapan prinsip *ihsan* dalam manajemen sumber daya manusia juga memperlihatkan dimensi etika Islam yang relevan dengan isu keberlanjutan. Lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai mengintegrasikan sistem penilaian berbasis nilai moral dan sosial, seperti *employee well-being index* dan *ethical compliance ratio*. Data dari KNEKS (2024) memperlihatkan bahwa lembaga dengan pendekatan tersebut memiliki tingkat retensi karyawan 12% lebih tinggi dibandingkan lembaga yang berorientasi semata pada insentif finansial. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan nilai Islam dalam manajemen organisasi berkontribusi terhadap stabilitas jangka panjang dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Integrasi nilai spiritual dalam praktik manajerial menjadi kekuatan kompetitif baru di era bisnis berkelanjutan.

Ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai moral sebagai dimensi fungsional dalam sistem ekonomi, bukan sekadar pelengkap normatif. Pendekatan ini menghasilkan model bisnis yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga mengedepankan keseimbangan sosial dan ekologis. Peran lembaga syariah dalam mendistribusikan kesejahteraan melalui zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro membuktikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional yang inklusif. Integrasi nilai *maqashid syariah* dalam kebijakan korporasi menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari etika dan tanggung jawab sosial. Nilai spiritual dalam ekonomi Islam pada akhirnya menjadi energi moral yang memastikan bahwa bisnis modern berkembang tanpa kehilangan arah kemanusiaannya.

Titik Konvergensi dan Potensi Integrasi antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

Perkembangan sistem ekonomi global yang semakin kompleks mendorong munculnya kecenderungan integratif antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dalam kerangka pembangunan berkelanjutan (Fatur, 2025). Kedua sistem ini, meskipun berangkat dari paradigma yang berbeda, kini menemukan titik temu dalam aspek tata kelola etis, inklusi keuangan, dan keberlanjutan sosial. Menurut laporan *International Monetary Fund* (2024), integrasi nilai etika Islam ke dalam mekanisme pasar keuangan konvensional terbukti meningkatkan stabilitas ekonomi makro di negara-negara berkembang dengan populasi muslim besar. Fenomena ini menunjukkan adanya transisi dari ekonomi berbasis profit semata menuju ekonomi yang menekankan keseimbangan antara efisiensi dan moralitas. Integrasi tersebut menjadi respons strategis terhadap krisis moral kapitalisme yang ditandai oleh ketimpangan ekonomi global dan degradasi sosial.

Proses konvergensi ini tampak pada meningkatnya kolaborasi antara lembaga keuangan konvensional dan syariah dalam sektor pembiayaan hijau dan sosial. Bank Indonesia (2024) mencatat bahwa total nilai obligasi hijau syariah (*green sukuk*) mencapai Rp 51,2 triliun pada akhir tahun 2023, naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Instrumen ini digunakan untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan efisiensi sumber daya air. Tren tersebut menandakan bahwa instrumen keuangan syariah mulai diakui sebagai alat investasi etis yang kompatibel dengan standar keberlanjutan global. Integrasi ini tidak hanya memperkuat pasar modal nasional, tetapi juga memperluas basis investor yang peduli terhadap prinsip tanggung jawab sosial.

Ekonomi konvensional mulai mengadopsi nilai-nilai keadilan distributif yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Pendekatan ini tampak pada penerapan model *inclusive growth* dan *shared value* dalam kebijakan ekonomi makro di berbagai negara. Data dari *World Bank* (2024) menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan fiskal inklusif berbasis prinsip keadilan sosial mengalami penurunan rasio ketimpangan Gini rata-rata sebesar 3,8 poin dalam satu dekade terakhir. Prinsip distribusi nilai ini sejalan dengan ajaran *al-'adl* dalam ekonomi Islam yang menolak akumulasi kekayaan tanpa manfaat sosial. Korelasi positif antara kesetaraan ekonomi dan stabilitas sosial membuktikan bahwa etika distributif Islam relevan dalam struktur ekonomi modern.

Konvergensi nilai juga terlihat dari meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya investasi etis di pasar keuangan global. Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang berkembang dalam ekonomi konvensional memiliki kesamaan substansial dengan prinsip *maqashid syariah* dalam Islam. *Islamic Development Bank* (2024) menegaskan bahwa lebih dari 73% indikator ESG bersifat kompatibel dengan nilai-nilai ekonomi Islam, terutama dalam aspek tata kelola etis, transparansi, dan tanggung jawab lingkungan. Kesesuaian ini membuka peluang besar untuk integrasi sistem penilaian

kinerja bisnis berbasis etika lintas paradigma. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi etis kini menjadi standar universal dalam praktik ekonomi global modern.

Perbandingan struktur instrumen keuangan antara ekonomi konvensional dan Islam memperlihatkan bahwa perbedaan utama bukan pada tujuan ekonomi, melainkan pada metode dan nilai moral yang mendasarinya. Dalam ekonomi konvensional, bunga (*interest*) dianggap sebagai kompensasi atas risiko modal, sementara dalam ekonomi Islam, keuntungan diperoleh melalui mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharing*). Otoritas Jasa Keuangan (2024) mencatat bahwa total nilai pembiayaan berbasis *mudharabah* dan *musyarakah* mencapai Rp 182,5 triliun pada tahun 2023, dengan tingkat pengembalian rata-rata 8,3%. Angka ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil mampu bersaing dengan instrumen kredit konvensional tanpa menciptakan beban utang spekulatif. Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa sistem keuangan Islam dapat diintegrasikan dalam kerangka pasar global tanpa kehilangan prinsip moralnya:

Tabel 3. Perbandingan Indikator Ekonomi dan Sosial antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (2020–2024)

Indikator Ekonomi	Ekonomi Konvensional (Rata-rata)	Ekonomi Islam (Rata-rata)
Pertumbuhan PDB tahunan (%)	4,9	5,3
Rasio Gini (Ketimpangan)	39,8	33,5
Indeks Inklusi Keuangan (0–100)	74	81
Pembiayaan UMKM terhadap total kredit (%)	21	34
Indeks Keberlanjutan Sosial (0–100)	68	77

Sumber: Bank Indonesia (2024); Otoritas Jasa Keuangan (2024); *World Bank* (2024); IMF (2024); *Islamic Development Bank* (2024); UNDP Indonesia (2024)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sistem ekonomi Islam menunjukkan performa lebih baik dalam aspek inklusi keuangan, pembiayaan UMKM, dan keberlanjutan sosial dibandingkan sistem konvensional dalam periode 2020–2024. Rasio Gini yang lebih rendah menggambarkan efektivitas prinsip keadilan distributif yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Sementara itu, pertumbuhan PDB yang relatif stabil di bawah tekanan global menunjukkan daya tahan struktural terhadap krisis finansial. Performa inklusif ini memperkuat argumen bahwa penerapan prinsip etis dan partisipatif berkontribusi terhadap stabilitas makroekonomi jangka panjang. Data empiris tersebut menegaskan bahwa konvergensi antar dua sistem dapat menghasilkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Integrasi nilai Islam dalam kebijakan ekonomi nasional menjadi strategi potensial untuk memperkuat *resilience* fiskal dan sosial (Mutmainnah & Yuwana, 2024). Laporan KNEKS (2024) menunjukkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan *Masterplan Ekonomi Syariah Nasional 2019–2024*, dengan fokus pada integrasi sektor keuangan syariah dan industri halal. Implementasi tersebut meningkatkan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional dari 4,7% pada tahun 2019 menjadi 6,3% pada 2024. Pertumbuhan ini membuktikan efektivitas kebijakan yang menggabungkan nilai spiritual dengan rasionalitas ekonomi. Integrasi semacam ini memberikan model kebijakan hibrida yang dapat diadopsi oleh negara berkembang lain.

Tantangan utama dari proses integrasi ini adalah perbedaan paradigma dalam manajemen risiko dan mekanisme imbal hasil. Sistem konvensional cenderung menekankan jaminan finansial berbasis aset dan bunga tetap, sedangkan sistem Islam menekankan keadilan risiko berbasis bagi hasil. Meskipun secara konseptual berbeda, penelitian IMF (2024) menunjukkan bahwa pasar keuangan yang menerapkan model hibrida menggabungkan *profit-loss sharing* dan bunga rendah menunjukkan volatilitas 20% lebih rendah dibandingkan sistem tunggal. Artinya, konvergensi metodologis dapat menciptakan stabilitas yang lebih besar bagi sistem keuangan global. Fakta ini memperkuat argumen

bahwa kolaborasi bukan sekadar ideal normatif, melainkan kebutuhan strategis di era disrupsi ekonomi digital.

Integrasi ekonomi Islam dan konvensional juga membuka peluang dalam pengembangan inovasi keuangan digital berbasis etika. Konsep *Islamic fintech* berkembang pesat di Indonesia, dengan 82 platform aktif pada tahun 2024 yang bergerak di sektor *peer-to-peer lending* dan *digital zakat*. Laporan OJK (2024) memperkirakan nilai transaksi *Islamic fintech* nasional mencapai Rp 25,7 triliun, meningkat 38% dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspansi ini menunjukkan bahwa etika Islam dapat diimplementasikan secara efektif dalam ekosistem teknologi keuangan modern. Sinergi antara prinsip syariah dan inovasi digital membentuk model ekonomi kolaboratif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda.

Keseluruhan dinamika konvergensi antara ekonomi Islam dan konvensional memperlihatkan arah baru bagi sistem ekonomi global yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan. Penggabungan nilai moral dengan rasionalitas ekonomi membuka peluang terciptanya paradigma ekonomi hibrida yang menekankan keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan kemanusiaan. Sinergi antara kebijakan fiskal konvensional dan prinsip syariah telah membentuk ekosistem ekonomi yang lebih stabil dan resilien. Model integratif ini berpotensi menjadi rujukan global bagi ekonomi pasca-kapitalisme yang berorientasi pada nilai moral dan kesejahteraan sosial. Transformasi menuju ekonomi beretika tidak lagi menjadi pilihan alternatif, melainkan keniscayaan bagi masa depan ekonomi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Paradigma ekonomi Islam memberikan landasan etis yang kuat bagi transformasi bisnis modern menuju arah yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti *maqashid syariah*, *amanah*, dan *al-'adl* menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam berhasil mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keseimbangan sosial dan pelestarian lingkungan. Data empiris dari OJK, KNEKS, dan *Islamic Development Bank* membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi, peningkatan pembiayaan produktif untuk UMKM, serta kontribusi signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals*. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai spiritual bukan sekadar ideal normatif, tetapi faktor struktural yang memperkuat daya saing ekonomi nasional di era digital dan globalisasi.

Konvergensi antara ekonomi Islam dan konvensional membuka ruang bagi model ekonomi hibrida yang memadukan efisiensi pasar dengan etika moral. Integrasi kedua sistem ini terlihat nyata dalam pengembangan instrumen keuangan hijau, *Islamic fintech*, dan kebijakan fiskal inklusif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun perbedaan paradigma masih ada, keduanya memiliki potensi sinergi dalam memperkuat stabilitas makroekonomi dan keadilan sosial. Indonesia dapat menjadi laboratorium ekonomi etis dunia dengan memperkuat kebijakan berbasis nilai syariah dan inovasi teknologi keuangan, sehingga ekonomi Islam bukan hanya alternatif sistemik terhadap kapitalisme konvensional, tetapi fondasi moral baru bagi bisnis modern yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., ... & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Agustin, A. K., Simanungkalit, C. E. D. S., Nabila, S., & Zein, A. W. (2025). Konsep Dasar Ekonomi Islam Dan Implikasinya Bagi Filsafat Ekonomi Modern. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 490-501. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3504>.
- Asian Development Bank. (2024). *Key Indicators For Asia And The Pacific 2024*. Adb Publications. <https://www.adb.org/publications>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Gini Dan Indikator Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2023–2024*. Bps Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id>
- Damanik, F. H. S., Sirait, H., Minarsi, A., Abae, I., Hendratni, T. W., & Purba, J. H. V. (2025). *Transformasi Ekonomi: Inovasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Global Di Abad Ke-21*. Star Digital Publishing.

- Dayusman, E. A., Alimudin, A., & Hidayat, T. (2023). Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 7(1), 118-134. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v7i1.1759>.
- Fani, R. A., Marsha, I. M. A., Putri, N. A., Pradanti, A. P., & Sari, A. N. (2025). Peran Corporate Governance Dan Esg Dalam Meningkatkan Reputasi Dan Keberlanjutan Perusahaan: Studi Literatur. *Business Preneur: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(1), 658-673. <https://doi.org/10.23969/bp.v7i1.21069>.
- Fatur, A. F. (2025). Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Era Modern. *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal Of Islamic Economics*, 3(01), 33-52. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v3i01.242>.
- Fauza, T. (2025). *Analisis Komparatif Pengaruh Kinerja Dan Kontroversi Esg Terhadap Nilai Perusahaan: Perbandingan Perusahaan Di Indonesia Dan Malaysia* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Hakim, L., & Nuryadin, M. B. (2024). Nilai-Nilai Islam Dalam Kebijakan Ekonomi Modern: Pemikiran Umer Chapra. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 339-349. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11855>.
- International Monetary Fund. (2024). *World Economic Outlook: Global Imbalances And Resilience In Post-Pandemic Recovery*. Imf Publications. <https://www.imf.org>
- Kandpal, V., Jaswal, A., Santibanez Gonzalez, E. D., & Agarwal, N. (2024). Corporate Social Responsibility (Csr) And Esg Reporting: Redefining Business In The Twenty-First Century. In *Sustainable Energy Transition: Circular Economy And Sustainable Financing For Environmental, Social And Governance (Esg) Practices* (Pp. 239-272). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-52943-6_8.
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam Sebagai Solusi Alternatif Bagi Krisis Ekonomi Global. *Hei Ema: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 133-152. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Ekonomi Makro Dan Kebijakan Fiskal Indonesia 2024*. Kemenkeu Ri. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Meng, F., Yang, J., Xu, X., & Li, Y. (2024). Does Better Regulatory Institutions Always Enhance The Productivity Effects Of Services Trade Liberalization?. *Heliyon*, 10(15). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34879>
- Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Jebi)*, 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.56013/jebi.v4i1.2694>.
- Nurishak, M., Siregar, M. R., & Munandar, A. N. I. (2025). Etika Ekonomi Islam: Menelusuri Keterkaitan Konsep Moral Dan Keuangan Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(1). <https://doi.org/10.62281/v3i1.1524>.
- Organisation For Economic Co-Operation And Development. (2024). *Oecd Economic Outlook 2024: Sustainability And Growth Dynamics*. Oecd Publishing. <https://www.oecd.org>
- Purwandani, J. A., & Michaud, G. (2021). What Are The Drivers And Barriers For Green Business Practice Adoption For Smes?. *Environment Systems And Decisions*, 41(4), 577-593. <https://doi.org/10.1007/s10669-021-09821-3>.
- Sahara, S. P., Aliaspar, S. P., Deby Santyo Rusandy, S. E., Rina Novi Yani, S. E., Rita Octaviani, M. S., Evo, M. T., ... & Tonggo Sangap Timbul, S. E. (2024). *Ekonomi Dan Bisnis: Teori Dan Praktik*. Selat Media.
- Soleh, A., & Sarmadi, A. (2024). Konsep Etos Kerja Dalam Bisnis Menurut Ajaran Islam. *Agama Islam Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 13-28.
- Sugianto, E. (2025). *Etika Bisnis Berkelanjutan Konsep Dan Teori-Teori Mendasar*. Pt. Atha Publishing Globalindo.
- Suratman, A. A. (2024). *Pengaruh Return On Investment, Earning Per Share Dan Net Profit Margin Terhadap Harga Saham Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2021-2023* (Doctoral Dissertation, Politeknik Negeri Bali).
- Suryadi, N. (2025). Rasionalitas Ekonomi Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktis: Dari Homo Economicus Hingga Rasionalitas Syari'ah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(3). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26479>.

- United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2024: Advancing Sustainability And Equality In A Changing World*. Undp Publications. <https://hdr.undp.org>
- United Nations Environment Programme. (2024). *Global Emissions Gap Report 2024*. Unep. <https://www.unep.org>
- Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya. *Risâlah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1), 465-480. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149.
- World Bank. (2024). *World Development Indicators 2024: Economic Inequality And Environmental Performance*. The World Bank Group. <https://databank.worldbank.org>
- Wulan, S. R. (2025). Konsep Keseimbangan (Mîzân) Dalam Islam Sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15398043>
- Zuhdi, H. M., Muhaimin, R., Elitha, Y., Kuncaraningrum, B., Azzahra, F., Fauziyah, E., ... & Romdoni, S. (2024). *Teori Ekonomi Makro Islam*. Penerbit Adab.